

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK. 03/2015 Pada
PT. Nito Nur Utama**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)
Perpajakan**



**Disusun Oleh :
Mochammad Randy Wahyu Utama
041210213036**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**



TAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/0.3/2015 Pada PT. Nito Sur Utama

Disusun oleh :

Mohammad Randy Wahyu Utama

NIM. 041210213036

Telah distugsi dan disetujui dengan baik

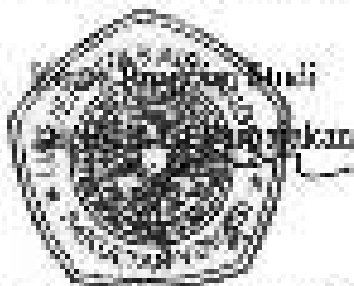
Dosen Pembimbing



Uka Sindhu Hartadinata, SE., AK., BKP., SAS

NIP. 198710262015041001

Tanggal 29-06-2016



Uka Sindhu Hartadinata, SE., AK., BKP., SAS

NIP. 198710262015041001

Tanggal 19-06-2016

Kepala Seksi Pengajaran



Enay Dwi Pulan, S.S., CA

Tanggal 6/6/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNYA sehingga dapat terselesaikannya Laporan Praktik Kerja Lapangan di PT Nito Nur Utama dengan baik dan lancar sehingga dapat selesai tepat waktu. Judul yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah **“Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK 0.3/2015 Pada PT. Nito Nur Utama”**. Laporan PKL ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md.).

Dalam proses penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan ini telah banyak sekali bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik Lapangan ini, diantaranya :

1. Allah SWT atas kemudahan, dan kelancaran yang diberikan hingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Dr.H.Widi Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CMA.,CA selaku Dekan Fakultas Vokasi.
3. BapakOkta Sindhu Hartadinata,SE,AK.,BKP.,SAS. selakuKoordinator Prodi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas AirlanggadanjugaDosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dengan sabar membimbing dan menyalurkan ilmunya kepada penulis hingga laporan ini dapat terselesaikan.
4. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga yang telah mendidik dan mengarahkan selama perkuliahan.

5. Kedua orang tua saya (Alm) Khusen Legiman dan Rini Nur Aini dan juga adik penulis, Renaldy Mauliansyah yang selalu memberikan doa, dukungan secara moral dan material.
6. Bapak H. Nito Sugianto selaku Direktur PT. Nito Nur Utama yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan.
7. Ibu Enny Dwi Wulan,AK.,CA selaku Kepala Seksi Perpajakan PT. Nito Nur Utama yang telah memberikan wawasan akan dunia kerja khususnya Perpajakan dan juga turut membantu penyelesaian laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
8. Bapak Sudar, Bapak Andik, MbakYeni dan Mbak Yuni yang telah memberikan wawasan akan dunia kerja.
9. Teman – teman Grup Line “ We Love Okta Sindhu” yang selalu membantu dan menginformasikan tentang Laporan Praktik Kerja Lapangan.
10. Teman – teman “SERIGALA TERAKHIR” sepertiBayu, Faizal, Aristo, Gogon, Ferruz, Nuzul, Ardian, Jamal, Zul, Ojan, Firman, Thomas, Derry, Ogeb, Arif, Zakki dan masih banyak lainnya,semua cerita kegembiraan, kegilaan, akan selalu penulis kenang dalam perjalanan hidup penulis selama 4 tahun perkuliahan.
11. Terimakasih untuk teman sepermainan SMA penulis, Rouyan, Agung, Dwi, Yudha yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan.
12. Semua teman – teman Perpajakan angkatan 2012 yang selama 4 tahun perkuliahan yang sangat membantu penulis dalam tugas kuliah, dan tutor ujian.
13. Terima kasih kepada Kak Sogol yang selalu setia menemani penulis dan warga perpajakan pada saat istirahat perkuliahan untuk sekedar kumpul bersama.
14. Terimakasih juga buat semua Warga Perpajakan baik angkatan atas maupun angkatan bawah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

yang telah memberikan kesan dan pelajaran tak terlupakan kepada penulis.

15. Semua orang yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja penulis pernah kenal. Bertemu kalian adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan ataupun kekhilafan yang disebabkan keterbatasan kemampuan seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu penulis dengan senantiasa menerima kritik dan saran membangun dari semua pihak agar Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Juni 2016

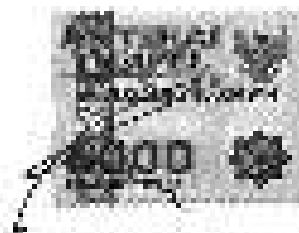
Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya, **Mohammad Randy Wahyu Utama**, NIM: **041210213036** menyatakan bahwa

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan saya ini adalah asli dan benar – benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan menggunakan saya, serta bukan merupakan hasil pinjaman atau pengjiplakan (plagiarisme) dan karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sumber dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penghapusan nama kuliah yang telah lulus karena karya ini, serta sanksi – sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 6 Juni 2016



Mohammad Randy Wahyu Utama
NIM 041210213036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TANDA PENGENAL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PKL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	6
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	7
1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	8
BAB 2PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	10
2.1 Gambaran Umum Tempat Pelaksanaan PKL.....	10
2.1.1 Sejarah PT. Nito Nur Utama.....	10
2.1.2 Lokasi PT. Nito Nur Utama.....	11
2.1.3 Visi dan Misi PT. Nito Nur Utama.....	11
2.1.4 Nilai – Nilai Dasar Perusahaan.....	12
2.1.5 Kapasitas Produksi.....	12
2.1.6 Stuktur Organisasi PT. Nito Nur Utama.....	12
2.1.7 Uraian Tugas Dari Masing-Masing Bidang di Lingkungan PT. Nito Nur Utama.....	14
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan	15
2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan.....	15

2.2.2	Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	16
2.3	Pembahasan	18
2.3.1	Penagihan dan Pembuatan Faktur oleh PT. Nito Nur Utama	18
2.3.2	Pelaporan SPT Masa oleh PT. Nito Nur Utama.....	20
2.3.3	Contoh Transaksi PPN di PT. Nito Nur Utama.....	21
BAB 3PENUTUP		23
3.1	Kesimpulan	23
3.2	Saran	23
3.2.1	Saran untuk PT Nito Nur Utama.....	23
3.2.2	Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.....	23
DAFTAR PUSTAKA		25
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	9
Tabel 2.1 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Struktur Organisasi PT. Nito Nur Utama	13
Gambar 2.2 Bagan Struktur Bidang Keuangan PT. Nito Nur Utama	13
Gambar 2.3 Prosedur Penagihan dan Pembuatan Faktur PT. Nito Nur Utama..	19
Gambar 2.4 Prosedur Pelaporan SPT PT. Nito Nur Utama	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keterangan PKL
Lampiran 2	: Absensi Mahasiswa PKL
Lampiran 3	: Daftar Nilai Tugas PKL
Lampiran 4	: Dokumentasi PKL di PT. Nito Nur Utama
Lampiran 5	: PMK. NO 62/PMK. 03/2015
Lampiran 6	: Faktur Pajak.....
Lampiran 7	:Kwitansi Penjualan
Lampiran 8	: Invoice
Lampiran 9	: Bukti Penerimaan Surat
Lampiran 10	: SPT PPN Masa Januari
Lampiran 11	:Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan
Lampiran 12	: Daftar Pajak Keluaran
Lampiran 13	: Surat Setoran Pajak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak.

Pengertian pajak sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) yaitu,

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang – barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda – denda, atau warisan yang diberikan kepada negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang – Undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dimana yang disebut dengan pajak (Suandi, 2014).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional. Kontraprestasi yang dapat ditunjuk bagi pembayar pajak kebanyakan bersifat tidak langsung namun terimplementasi dari yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri atau menjadi beban oleh wajib pajak sendiri sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain sebagainya.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan dan dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Cukai, Ekspor, dan Impor.

Kemudian terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

1. *Official Assessment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Pajak memiliki fungsi secara sederhana untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin banyak. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan, sedang pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang didalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari, dapat dirasakan manusia sebagai makhluk yang memiliki dan melakukan macam-macam kegiatan tertentu yang sangat dekat sekali dengan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) berwujud atau tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dan didalam Daerah Pabean. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN).

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment system* berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Pajak di Indonesia juga diatur oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Salah satu PMK yang baru terbit saat ini adalah PMK Nomor 62/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu Untuk Sektor Pertanian.

PMK Nomor 62/PMK.03/2015 diterbitkan dengan menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **75/PMK.03/2010** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **38/PMK.011/2013** diatur ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **238/PMK.03/2012** diatur ketentuan mengenai saat lain sebagai saat pembuatan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak dengan karakteristik tertentu;
- c. bahwa dalam rangka penyederhanaan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, dan memberikan kepastian hukum atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, perlu mengatur secara tersendiri penetapan nilai lain sebagai

Dasar Pengenaan Pajak dan saat lain pembuatan faktur pajak atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian dalam Peraturan Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang Nomor **8 TAHUN 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **42 TAHUN 2009**, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian;

PT. Nito Nur Utama merupakan wajib pajak yang menjalankan ketentuan PMK Nomor 62/PMK.03/2015 tersebut. Sehingga berdasar uraian di atas, maka judul yang akan diambil adalah “Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK. 03/2015 pada PT. Nito Nur Utama”

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari praktik kerja lapangan yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui penerapan dan pengaplikasian teori tentang perpajakan khususnya mengenai pengenaan PMK Nomor 62/PMK.03/2015.
3. Menemukan permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencoba mencari solusi serta penyelesaian yang tepat khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan atas pengenaan PMK Nomor 62/PMK.03/2015.
4. Menambah pengalaman serta memperdalam ilmu perpajakan yang diperoleh dibangku perkuliahan serta mengembangkan *skill* dan kemampuan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya,

1. Bagi penulis
 - a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan praktik kerja pada perusahaan maupun instansi pemerintahan serta mendapatkan pengalaman kerja dan mengetahui kegiatan yang dilakukan pada saat di lapangan.
 - b. Melalui praktik kerja lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktek kerja lapangan.
 - c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan ke dalam dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - a. Mampu menghasilkan lulusan Program Studi Diploma III Perpajakan yang handal, profesional dan memiliki pengalaman kerja lapangan di bidangnya.
 - b. Terjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT. Nito Nur Utama.
 - c. Memberikan bahan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Studi Diploma III perpajakan yang akan mengambil mata kuliah laporan terakhir.
 - d. Memberikan tambahan referensi tentang perpajakan pada ruang baca bagi Fakultas Vokasi.
3. Bagi PT. Nito Nur Utama
 - a. Terjalannya relasi baik dengan Universitas Airlangga Surabaya terutama Fakultas Vokasi Program Studi Diploma III Perpajakan.

- b. Dengan adanya PKL, diharapkan membantu pegawai PT. Nito Nur Utama mengenai administrasi perpajakannya.
 - c. Memberikan tambahan referensi tentang perpajakan pada PT. Nito Nur Utama.
4. Bagi Pembaca
- a. Memberikan gambaran mengenai aspek perpajakan atas pengenaan PMK Nomor.62/PMK.03/2015.
 - b. Menambah dan memperluas wawasan khususnya untuk masyarakat umum tentang mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas nilai lain.
 - c. Memberikan informasi tentang nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
 - d. Menambahkan referensi dan gambaran tentang penulisan tugas akhir Praktik Kerja Lapangan dan cara penyusunannya.

1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Nito Nur Utama selama lima minggu terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016. Dilaksanakan setiap hari kerja (senin – jumat) pada jam kerja 08:00 – 17:00.

Tabel 1.1
Jurnal Kegiatan Praktis: Kerja Lapangan

NO	Tgl Kegiatan	Agustus 2016				September 2016				Oktober 2016				November 2016				Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017				Mei 2017				Juni 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
-	Program Kerja/Unduhan																																												
	gk 141																																												
	Induk lam																																												
	Induk lam																																												
-	Induk lam																																												
	Induk lam																																												
	Induk lam																																												
-	Partisipasi TV																																												
	Partisipasi TV																																												
	Partisipasi TV																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												
	Partisipasi																																												
-	Programasi dan																																												
	Partisipasi dan																																												

BAB 2

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Berikut ini akan penulis paparkan gambaran umum dari PT. Nito Nur Utama mengenai sejarah singkat perusahaan, gambaran bisnis perusahaan, gambaran kondisi perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan serta tugas dan tanggung jawab masing masing.

2.1.1 Sejarah PT. Nito Nur Utama

PT. Nito Nur Utama didirikan oleh Bapak Nito Sugianto pada tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan No Izin HO 660/374/404.6.2/2013 PT. Nito Nur Utama bersama PT. Petrokimia Gresik melakukan pengembangan dan menjalin hubungan kerja sama dalam memproduksi pupuk organik bernama Petroganik.

Langkah ini sebagai wujud semangat untuk terus berinovasi dan bentuk kepedulian terhadap lingkungan, serta aplikasi dari peraturan pemerintah mengenai penggunaan pupuk organik. Pupuk Petroganik memiliki karakteristik yang berbeda dengan pupuk berbahan zat kimia memerlukan strategi pengembangan yang berbeda. Demi dapat menyesuaikan dengan kondisi tanah serta bahan baku yang tiap daerah berbeda, maka pengembangan pabrik Petroganik didirikan pada tiap daerah dengan kerjasama dengan investor dari daerah masing - masing.

Saat ini PT. Nito Nur Utama telah mendistribusikan pupuk Petroganik hampir diseluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. PT. Nito Nur Utama merupakan salah satu mitra terbaik PT. Petrokimia Gresik dengan memberikan nilai – nilai Profesionalisme, Pengembangan Teknologi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya sebagai landasan dasar dalam memberikan layanan terbaik demi kepuasan pelanggan.

2.1.2 Lokasi PT. Nito Nur Utama

PT. Nito Nur Utama menempati lahan seluas 1,2 hektar yang berlokasi di Jalan Raya Kludan No 35, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi

Jawa Timur. PT Nito Nur Utama memiliki satu bangunan kantor, satu bangunan pabrik, dan dua bangunan gudang.

Dipilihnya Kabupaten Sidoarjo, terutama Kecamatan Tanggulangin sebagai lokasi pabrik pupuk, karena Kecamatan Tanggulangin dinilai ideal dengan pertimbangan antara lain :

1. Masih tersedianya lahan kosong untuk industri pupuk.
2. Berdekatan dengan sumber bahan baku pupuk, antara lain kotoran ternak, limbah industri tahu dan limbah ampas tebu.
3. Berdekatan dengan Jalan Raya Surabaya – Malang dan Jalan Tol Surabaya – Gempol sehingga memudahkan untuk mengangkut hasil produksi dan pengadaan bahan baku.
4. Berdekatan dengan Kota Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan, yang memiliki peralatan yang memadai, antara lain tersedianya sumber daya manusia.
5. Selain berdekatan dengan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan yang memiliki manfaat sektor sumber daya manusia, strategisnya lokasi juga mempunyai manfaat dalam kemudahan mengangkut hasil produksi, memperoleh bahan – bahan pokok produksi dan bengkel – bengkel besar untuk memudahkan perbaikan peralatan produksi.

2.1.3 Visi dan Misi PT. Nito Nur Utama

1. Visi

Menjadi produsen pupuk yang berdaya saing tinggi dan produknya diminati konsumen.

2. Misi

- a. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.
- b. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri pupuk nasional.

2.1.4 Nilai – Nilai Dasar Perusahaan

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan, PT. Nito Nur Utama telah menetapkan nilai – nilai dasar yang digunakan sebagai landasan operasional, yakni:

1. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kegiatan operasional.
2. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
3. Meningkatkan inovasi untuk meningkatkan bisnis.
4. Mengutamakan integritas diatas segala hal.
5. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergis.

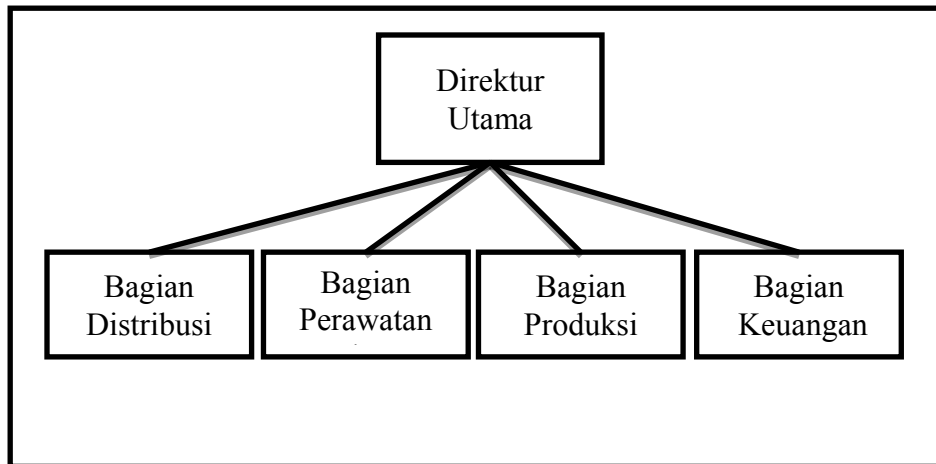
2.1.5 Kapasitas Produksi

Sesuai dengan program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional yang semakin besar dari tahun ke tahun, PT. Nito Nur Utama berupaya untuk berkembang dalam meningkatkan kapasitas produksi dari 8400 ton/tahun (2013) menjadi 36.700 ton/tahun (2015).

2.1.6 Stuktur Organisasi PT. Nito Nur Utama

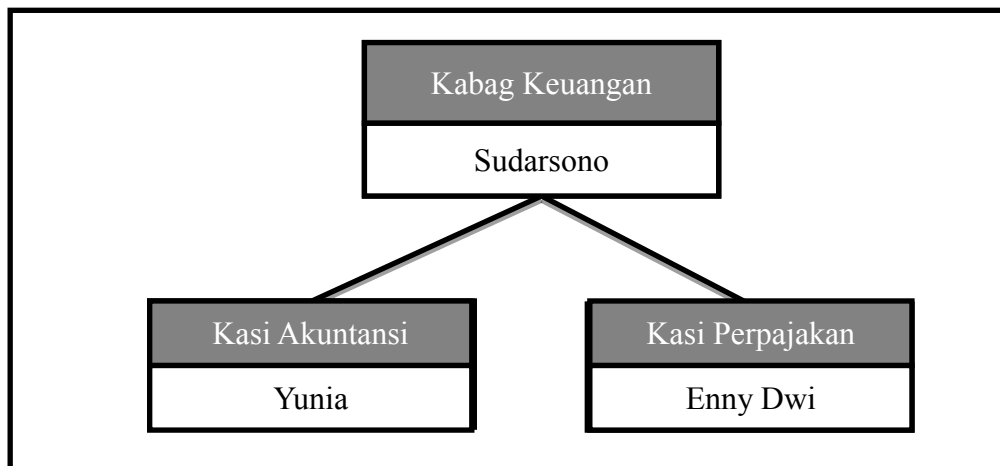
Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam melaksanakan kegiatannya sehingga fungsi manajemen dalam perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi PT. Nito Nur Utama disajikan dalam Gambar 2.1, berikut ini :

Gambar 2.1
Bagan Susunan Struktur Organisasi
PT. Nito Nur Utama



(sumber : PT. Nito Nur Utama,2016)

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Bidang Keuangan
PT. Nito Nur Utama



(sumber : PT. Nito Nur Utama,2016)

2.1.7 Uraian Tugas Dari Masing-Masing Bidang di Lingkungan PT. Nito Nur Utama

Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini akan dibahas satu persatu tugas dari setiap jabatan yang ada, namun akan dijelaskan deskripsi tugas-tugas tersebut secara garis besar dari masing-masing bidang.

2.1.7.1 Direktur Utama

Bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya strategi dan pengelolaan hasil produksi sesuai dengan misi dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif, dan sinergis dengan target kinerja dengan tugas pokok sebagai mengusulkan rencana jangka panjang dan rencana kerja anggaran.

2.1.7.2 Bagian Distribusi

Bertanggung jawab dalam mewujudkan pemasaran dan pelayanan pelanggan dalam hal pengiriman hasil produksi dan menentukan target dan strategi pemasaran tahunan, pencapaian strategi untuk mendapatkan target keuntungan bagi perusahaan.

2.1.7.3 Bagian Perawatan dan Pengadaan Barang

Bertanggung jawab dalam perawatan, pemeliharaan aset perusahaan, serta mengusulkan dan mendatangkan mesin produksi yang baik dan layak.

2.1.7.4 Bagian Produksi

Berperan dalam menjalankan kegiatan pengolahan bahan baku sampai menjadi barang produksi.

2.1.7.5 Bagian Keuangan

Melaksanakan pengelolaan daya keuangan dalam kegiatan pembiayaan, operasi, pendapatan yang terselenggara didalam laporan keuangan sesuai dengan kebijakan manajemen dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap resiko.

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa khususnya Program Studi DIII Perpajakan Universitas Airlangga Surabaya untuk menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Nito Nur Utama bagian Keuangan khususnya Perpajakan sebagai tempat melaksanakan studi kasus peraturan baru mengenai Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 62/PMK. 03/2015. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan, dimulai dari tahap awal persiapan hingga pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Rincian proses kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan diawali dengan mencari tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Pada tahap ini, Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dengan mengajukan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan dari pihak Universitas bagian akademik dengan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, kemudian Mahasiswa membuat proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan yang diajukan ke tempat yang akan dituju untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Hal ini dilakukan Mahasiswa untuk memperoleh izin dari pihak yang akan dituju untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 5 (lima) minggu serta telah disetujui oleh pimpinan dari tempat yang akan dituju sampai dengan data – data yang diperlukan untuk melengkapi Tugas Akhir Praktik Kerja Lapangan. Adapun Surat Izin Melakukan Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat pada halaman lampiran 1.

Pada tahap persiapan, mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan juga mendapatkan pembekalan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai dari pemberitahuan persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan, lalu tata tertib sampai dengan hal-hal yang harus dipenuhi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan serta batas minimal waktu dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan dan saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di didampingi oleh pembimbing dari perusahaan yang memberikan arahan serta tugas dan untuk memberikan penilaian terhadap aktivitas selama Praktik Kerja Lapangan. Dalam hal melaksanakan Praktik Kerja Lapangan harus memenuhi beberapa hal antara lain yaitu menyerahkan daftar penilaian kegiatan dan daftar kehadiran kepada pihak yang ditunjuk sebagai pembimbing mahasiswa di tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan untuk menilai hasil kerja mahasiswa.

2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Nito Nur Utama yang beralamat di Jalan Raya Kludan No 35, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama lima minggu yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016. Bagian Keuangan khususnya Perpajakan.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan setiap hari kerja (senin – jumat) pada jam kerja 08:00 – 17:00. Kegiatan yang dilakukan selama PKL dapat diuraikan ditabel 2.1.

Tabel 2.1
Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tanggal	Seksi	Kegiatan
Minggu 1		
1 Februari 2016	Pajak	Pengenalan Perpajakan dasar menurut staff keuangan PT. Nito Nur Utama
2 Februari 2016	Pajak	Menginput transaksi penjualan
3 Februari 2016	Pajak	Pembelajaran mengenai PPN dan E-SPT Masa PPN
4 Februari 2016	Pajak	Menginput pajak keluaran ke dalam E-SPT masa PPN
5 Februari 2016	Pajak	Menggolongkan SSP dan stempel SSP
Minggu 2		
8 Februari 2016	Pajak	Melaporkan SPT ke KPP Sidoarjo Selatan
9 Februari 2016	Pajak	Pembelajaran mengenai PPh 21 dan E-SPT PPh 21
10 Februari 2016	Pajak	Menginput data bukti potong PPh Pasal 21
11 Februari 2016	Pajak	Menginput transaksi penjualan
12 Februari 2016	Pajak	Menginput transaksi penjualan
Minggu 3		
15 Februari 2016	Pajak	Menghitung Pajak Badan memasukkannya ke dalam SPT
16 Februari 2016	Pajak	Menghitung Pajak Badan memasukkannya ke dalam SPT
17 Februari 2016	Pajak	Stempel dan penggolongan dokumen
18 Februari 2016	Pajak	Mensortir bukti kas/bank dan dokumen
19 Februari 2016	Pajak	Mensortir bukti kas/bank dan dokumen
Minggu 4		
22 Februari 2016	Pajak	Menginput transaksi penjualan
23 Februari 2016	Pajak	Menginput transaksi penjualan
24 Februari 2016	Pajak	Penyusunan Laporan Pembelian & Penjualan Bulanan

Tanggal	Seksi	Kegiatan
25 Februari 2016	Pajak	Review Laporan Keuangan
26 Februari 2016	Pajak	Mensortir bukti kas/bank dan dokumen
Minggu 5		
29 Februari 2016	Pajak	Menginput transaksi penjualan
1 Maret 2016	Pajak	Menginput transaksi penjualan
2 Maret 2016	Pajak	Menginput data bukti potong PPh Pasal 21
3 Maret 2016	Pajak	Menginput pajak keluaran ke dalam E-SPT masa PPN
4 Maret 2016	Pajak	Diskusi tentang topik penulisan Tugas Akhir

(Sumber: Data Rekapitulasi Kehadiran dan Nilai Peserta PKL, 2016)

2.3 Pembahasan

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Nito Nur Utama penulis telah memperoleh berbagai macam data dan informasi yang selanjutnya diolah untuk dilaporkan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

2.3.1 Penagihan dan Pembuatan Faktur oleh PT. Nito Nur Utama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK. 03/2015 yaitu prosedur penagihan dan pembuatan faktur pajak oleh PT. Nito Nur Utama. PT. Nito Nur Utama selaku produsen pupuk Petroganik dan PT. Petrokimia Gresik selaku Distributor pupuk Petroganik. PT. Nito Nur Utama menagih pembayaran dan menerbitkan faktur kepada PT. Petrokimia Gresik atas transaksi penjualan pupuk Petroganik.

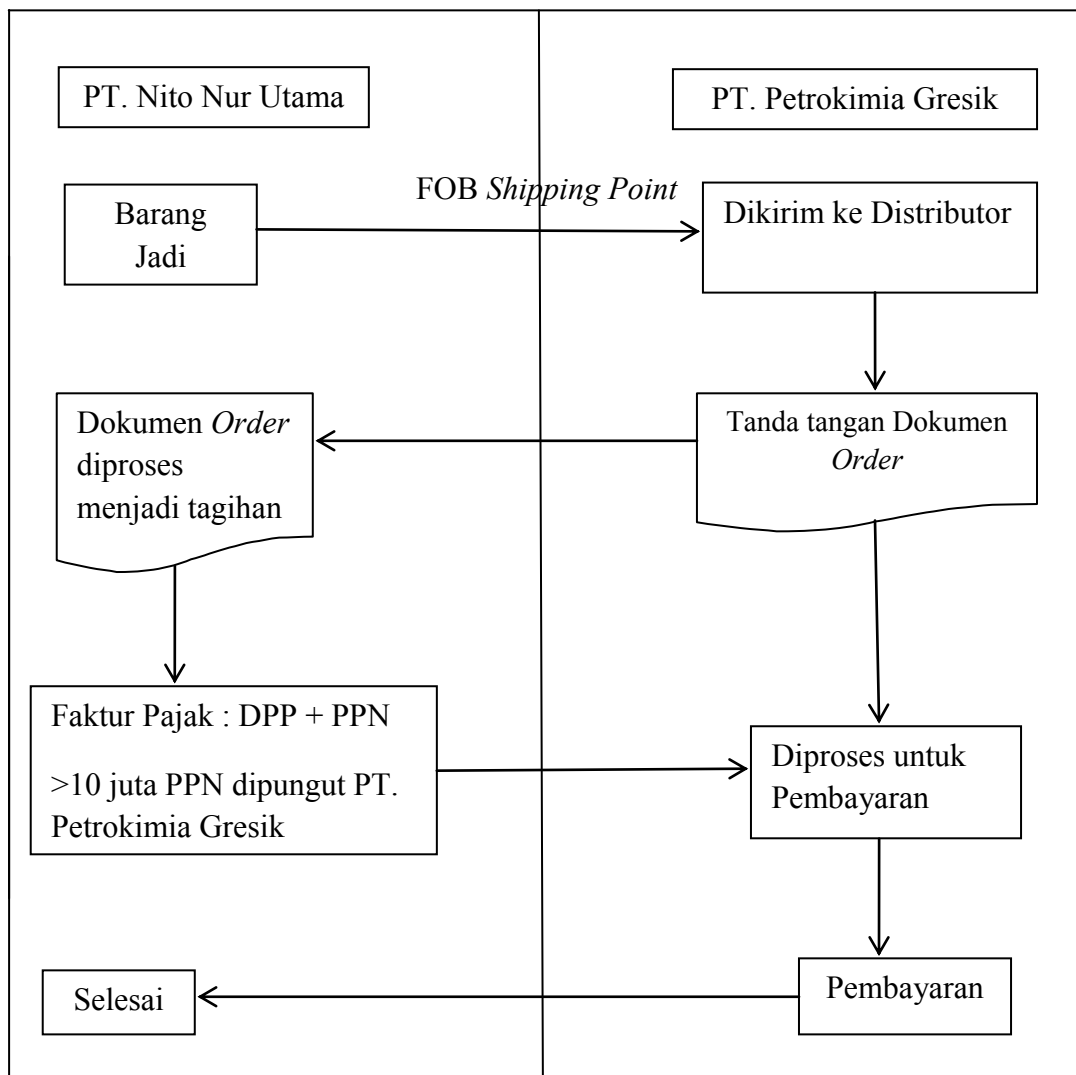
Adapun prosedur penagihan dan pembuatan faktur oleh PT. Nito Nur Utama adalah sebagai berikut :

1. PT. Nito Nur Utama memproduksi pupuk Petroganik dan mengirimkan ke distributor PT. Petrokimia Gresik.

2. Setelah distributor PT. Petrokimia Gresik menerima barang, PT. Petrokimia Gresik menandatangani Dokumen *Order*.
3. Setelah penandatanganan Dokumen *Order*, PT. Nito Nur Utama memproses Dokumen *Order* tersebut menjadi tagihan.
4. PT. Nito Nur Utama menerbitkan faktur pajak kepada PT. Petrokimia Gresik.
5. Kemudian PT. Petrokimia Gresik memproses faktur pajak untuk pembayaran.
6. Setelah memproses faktur pajak, PT. Petrokimia Gresik melakukan pembayaran.

Gambar 2.3

Prosedur Penagihan dan Pembuatan Faktur PT. Nito Nur Utama



(sumber: PT. Nito Nur Utama, 2016)

2.3.2 Pelaporan SPT Masa oleh PT. Nito Nur Utama

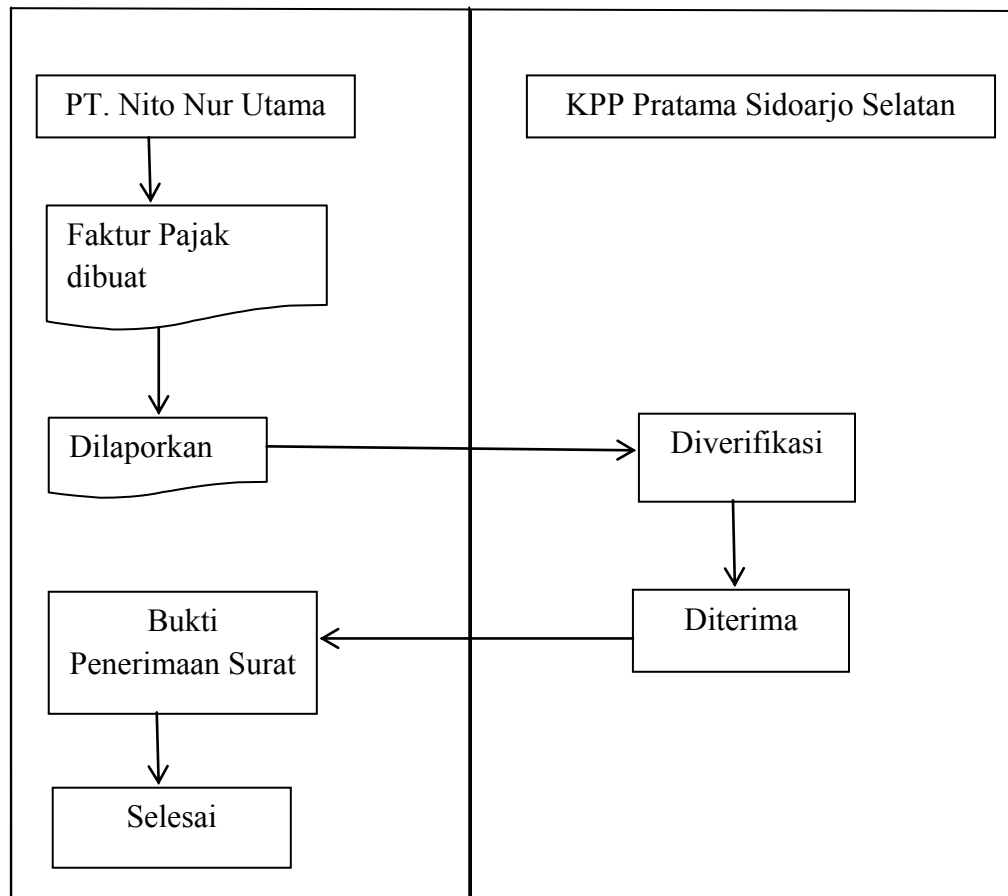
Setelah menyelesaikan penagihan dan pembuatan faktur pajak, PT Nito Nur Utama berkewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir masa pajak berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Selatan.

Adapun prosedur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Nito Nur Utama adalah sebagai berikut:

1. Staff perpajakan PT. Nito Nur Utama melakukan *entry* pajak keluaran ke e-faktur dan kemudian mencetak CSV.
2. Staff perpajakan PT. Nito Nur Utama melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan membawa *hardcopy* SPT dan CSV.
3. Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan memverifikasikan SPT.
4. Kemudian memperoleh Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.

Alur dari narasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Prosedur Pelaporan SPT PT. Nito Nur Utama



(sumber: PT. Nito Nur Utama, 2016)

2.3.3 Contoh Transaksi PPN di PT. Nito Nur Utama

PT. Nito Nur Utama melakukan penjualan pupuk Petroganik kepada PT. Petrokimia Gresik. Sebagai contoh pada masa Januari 2016 PT. Nito Nur Utama menjual pupuk Petroganik 40 kg dengan harga Rp 1.243.000 dimana harga tersebut sudah termasuk PPN sebanyak 100 unit disetiap transaksi kepada PT. Petrokimia Gresik.

Perhitungannya :

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp } 124.300.000 = \text{Rp } 113.000.000$$

$$\text{PPN} = 10/110 \times \text{Rp } 124.300.000 = \text{Rp } 11.300.000 +$$

$$\text{Tagihan} = \text{DPP} + \text{PPN} = \text{Rp } 124.300.000$$

Jadi penjualan pupuk Petroganik kepada PT Petrokimia Gresik sebesar Rp 113.000.000 dan dipungut PPN sebesar Rp 11.300.000 dan PT. Petrokimia Gresik mendapatkan tagihan sebesar Rp 124.300.000. Pembayaran yang diterima oleh PT. Nito Nur Utama Rp 113.000.000 dan bukti pungut berupa SSP diterima Rp 11.300.000. Dari transaksi di atas data – data pendukung transaksi sudah terlampir di lampiran.

Sesuai dengan aturan PMK No. 62/ PMK. 03/2015 harga tersebut didistributor memiliki DPP yang sama dengan nilai penyerahan PT. Nito Nur Utama. Karena dalam pembahasan tulisan ini penyerahan dilakukan dengan PT. Petrokimia Gresik yang merupakan wajib pajak wajib pungut maka kode faktur menjadi “03”

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari Uraian Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama lima minggu di PT. Nito Nur Utama, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Nito Nur Utama telah melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 62/PMK.03/2015.
2. Pelaporan dan penyetoran pajak di PT. Nito Nur Utama telah dilaksanakan pada tepat waktu.

3.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi PT. Nito Nur Utama dan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.

3.2.1 Saran untuk PT. Nito Nur Utama

1. Tetap patuh dan taat dalam melaksanakan aturan undang – undang perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi – sanksi perpajakan.
2. Harus selalu mengikuti peraturan – peraturan perpajakan yang terbaru.
3. Pengarsipan dokumen harus lebih diperbaiki.

3.2.2 Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Untuk memudahkan Mahasiswa dalam pembuatan Surat Pengantar Praktik Kerja Lapangan dan membina relasi perusahaan – perusahaan terkait, sehingga Mahasiswa tidak bingung dalam mencari referensi Praktik Kerja Lapangan.
2. Didalam perkuliahan sebaiknya perlu ditambah materi – materi yang sangat berkaitan dengan perpajakan agar Mahasiswa dapat memiliki bekal yang baik dalam memasuki dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/ PMK 0.3/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak Atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian*.
- Fitriandi, Primandita, Yudi Aryanto, dan Agus Puji Priyono, 2011. *Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap*, Jakarta: Salemba Empat.
- Forum Pajak. 2016. *Pengenaan PPN atas Pupuk untuk Petani*<http://forumpajak.org/pengenaan-ppn-atas-pupuk-untuk-petani/> diakses tanggal 17 April 2015.
- Suandi, Erly, 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sukarji, Untung, 2015. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*, Jakarta: RajawaliPers.

Lampiran 1

Surat Keterangan PKL

**PT. NITO NUR UTAMA**

JL. RAYA KLUDAN NO. 35 Ds. KLUDAN – TANGGULANGEN –
SIDHARJO

No Telp: 031-8078377, No Fax: 031-80786784

Email: nur@nito-nur.com

SURAT KETERANGAN

No.01/PT.NNU/ 042016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : H. Nito Sugianto
- Jabatan : Direktur PT. Nito Nur Utama

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Nama : Mohammad Randy Wahyu Utama
- NIM : 041210312036
- Fakultas : Vokasi
- Prodi : DIII Perbankan
- Universitas : Universitas Airlangga Surabaya

Telah menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Bidang Keuangan PT. Nito Nur Utama pada tanggal 1 Februari 2016 – 4 Maret 2016.

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Mahasiswa tersebut telah mematuhi peraturan – peraturan perusahaan dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidharjo, 27 April 2016

Direktur PT. Nito Nur Utama

H. Nito Sugianto

Lampiran 2

Absensi Mahasiswa PKL

Minggu Ke 1

[illegible]

Minggu Ke 2

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

REMARKS: *1. No change in the figures reported in the last year.*

Minggu Ke 3

[illegible]

Minggu Ke 4

DAFTAR NILAI TUGAS PKL
 PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN PERPAJAKAN
 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
 JABANGARAN SURABAYA

NO. DAFTAR: 11111111111111111111

No.	TANGGAL	JURUSAN	MATA KULIAH	LEMBAGA TUJUAN	PENILAIAN	
					KELOMPOK	INDIVIDUAL
1	11/11/2011	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	
2	12/11/2011	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	
3	13/11/2011	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	
4	14/11/2011	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	
5	15/11/2011	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	Manajemen Pajak	

Diketahui dan disetujui
 Kepala Laboratorium
 NAMA: ...
 NIP: ...

Diketahui dan disetujui
 Kepala Laboratorium
 NAMA: ...
 NIP: ...

Minggu Ke 5

[illegible]

Lampiran 3

Daftar Nilai Tugas PKL

[illegible]

Lampiran 4

Dokumentasi PKL di PT. Nito Nur Utama



PMK No 62/PMK 0.3/2015

[illegible]

1. **УТВЕРЖДАЮ:** _____
 2. **ПОДПИСАНИЕ:** _____
 3. **ПЕЧАТЬ:** _____

הערות

1. The purpose of this study is to determine the effect of the use of the Internet on the performance of the business.

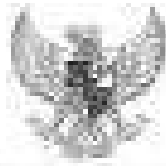
Hilbert's Program

1. How many people are there in your family?

Notwithstanding, the above mentioned activities have allowed the City of Chicago to stay on top of the latest information and trends, and to develop and implement the most effective strategies to address the problem of illegal gambling.

1. Learn mathematics. Andrew Wiles, Princeton, 1993.
2. Do math. Michael Atiyah, London, 1993. (This is a
very good book, but it is not a book, it is a book.)
3. Do math. Michael Atiyah, London, 1993. (This is a
very good book, but it is not a book, it is a book.)

[illegible][illegible]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah Larangan Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2064) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DARI SAAT LAIN PEMBIYATAN PARTISIPASI ATAS PENTERAHAN SUPRA TERSEKUTU UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
2. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak;
3. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kekuasaan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan anggaran yang dialokasikan kepadanya;
4. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/digenerasi oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pelaksana Anggaran SPM untuk melaksanakan aliran dana yang mengalir darinya dari LRA atau dokumen lain yang diperkenankan.

Pasal 2

- (1) Area penterahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian meliputi Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pupuk tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan tanaman padi dan/atau petani di sektor pertanian, yang meliputi Pupuk Hivo, Pupuk GP 05, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.



-3-

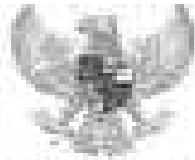
- (3) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang tertentu untuk sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang tertentu yang bagian harganya disubstitusi termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dibayar oleh Pemerintah; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang tertentu yang bagian harganya tidak disubstitusi, dibayar oleh penjen.

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan barang tertentu untuk sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Nilai Lain.
- (2) Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas bagian harga barang tertentu yang disubstitusi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula $100/110$ (seratus per seratus sepuluh) dari jumlah pembayaran subditi.
- (3) Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas bagian harga barang tertentu yang bagian harganya tidak disubstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah nilai berupa uang yang dihitung dengan formula $100/110$ (seratus per seratus sepuluh) dari harga eceran tertinggi (HET).
- (4) Harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga tertinggi barang bersubstitusi dalam kawasan tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang pertanian dan di lingkungan subsektor tertentu oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4

Pasal 5

- (1) Atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian mulai dari tingkat produsen, distributor, pengecer hingga ke kelompok tani dan/atau petani dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai satu kali pada tingkat produsen.
- (2) Produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan/atau petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produsen, distributor, pengecer, kelompok tani dan/atau petani sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan dan penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh KPA pada saat pembayaran subsidi dengan cara pemotongan langsung dari tagihan produsen pada SPM yang berkenaan.
- (4) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh produsen pada saat produsen menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepada distributor, atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan melalui penyerahan.

Pasal 6

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibayar Faktur Pajak pada saat produsen menyampaikan permohonan pembayaran atau tagihan subsidi pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepada Kantor Pelayanan Perpajakan Negara (KPPN) melalui KPA.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dalam rangkai 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk KPA;
 - b. lembar ke-2 untuk produsen;
 - c. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perpajakan Negara (KPPN);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- d. lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (3) Tata cara pengisian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibuat Faktur Pajak pada saat produsen menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian kepada distributor, atau pada saat pembayaran dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.
- (5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) Produsen membuat Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan jumlah subsidi berdasarkan hasil verifikasi dan menyampaikan kepada KPA.
- (2) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk produsen;
 - b. lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - c. lembar ke-3 untuk produsen dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);
 - d. lembar ke-4 untuk pertinggal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (3) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas produsen, dan untuk penandatanganan Surat Setoran Pajak (SSP) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyetor atas nama produsen.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (4) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pajak Masukan atas perolehan pupuk tertentu untuk sektor pertanian sehubungan dengan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian antar produsen, dapat dikreditkan.
- (2) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian yang dilakukan oleh distributor maupun pengecer tidak dapat dikreditkan.

Pasal 9

- (1) Atas penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian oleh distributor dan pengecer tidak perlu dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Distributor dan pengecer yang dalam usahanya semata-mata melakukan penyerahan pupuk tertentu untuk sektor pertanian, tidak perlu dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- (3) Pengusaha yang dalam usahanya selain menyerahkan pupuk tertentu untuk sektor pertanian juga menyerahkan Barang Kena Pajak/jasa Kena Pajak lainnya, berlaku ketentuan mengenai pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.04/1996 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 452

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BINA UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Lampiran 6

Faktur Pajak

[illegible]

Lampiran 7

Kwitansi Penjualan

 PT. PETROBRAS UTARA Gedung B, Lt. 12, Jln. D.S. Setiabudi Tanjung Airin - Pekanbaru Telp./Fax : (081) 8078377	No. Kontrasal : 0001/18A/002
	Telah diterima dari : PT. PETROBRAS GRIS W. Group as/transfer : <u>if transfer dari as/transfer, maka as/transfer akan dipotong</u> Untuk pembayaran : <u>Pupuk Organik Rp. 124.300.000,- per bulan No. 1271213</u> <u>terang 15 Des-2005 dan PPN 10% 156 Rp. 15.6412 Tgl. 23-Des-2015</u>
Total Nilai : Rp. 124.300.000,00	Pekanbaru, 07 Januari 2016  A. Nizar Direktur

Lampiran 8

Invoice

 PT. NITO MUR UTAMA Jalan Industri No. 104-104A, Jember, Jawa Timur 66131 Telp. (031) 8311111, Fax (031) 8311111		No. Invoice : 001/15/NTU Tgl. Invoice : 27 Januari 2015			
INVOICE					
DITUKAN : PT. NITO MUR UTAMA Alamat : Jl. Industri No. 104-104A, Jember 66131 Telp. (031) 8311111					
NO	Uraian Barang	Unit	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1	PL. K. 00000000 Detail barang : No. PO : 11/0000 Tanggal : 11-01-15 No. Invoice : 001/15/NTU	1.000	100	Rp. 1.100.000,00	Rp. 110.000.000,00
					Rp. 110.000.000,00
					Rp. 110.000.000,00

(Perhitungan dan total sesuai dengan invoice ini)

NO. 1 : []

asumsi :
 asumsi :
 asumsi :


 P. Nito Mur Utama
 Direktur

Lampiran 9

Bukti Penerimaan Surat

[illegible]

SPT PPN Masa Januari



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPPT NPPN)

FORMULIR 1111

1. IDENTITAS PEMAYORAN PAJAK

a. Nama Wajib Pajak: PT ABC KAWAN BARU

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 0000000000000000

c. Alamat: Jl. Merdeka No. 10, Jakarta 10110

2. PERIODE PELAYANAN

a. Bulan: 01 Tahun: 2020

b. Masa Pajak: 01/01/2020 - 31/12/2020

3. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

4. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

5. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

6. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

7. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

8. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

9. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

10. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

11. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

12. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

13. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

14. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

15. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

16. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

17. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

18. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

19. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

20. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

21. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

22. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

23. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

24. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

25. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

26. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

27. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

28. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

29. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

30. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

31. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

32. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

33. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

34. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

35. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

36. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

37. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

38. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat: 123456789

39. DATA PEMERIKSAAN

a. Nama Pemeriksa: ABDULLAH

b. Jabatan: Manajer Pajak

c. No. Sertifikat

Daftar Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan

[illegible]


Lampiran 12

Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2 (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PJ.01/2015)			
Nama : PT. PETRONAMA					Masa : 31 Juli 2015 (mm mm yyyy)			
NPWP : 0000000000					Periode : 1 2			
No.	Nama dan Alamat Pemohon Kecuali NPWP Wajib Sering Pemisahan NPWP	NPWP Nomor Paspor	Faktur Pajak Nomor dan Tanggal Sesuai Faktur Pajak		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Ged dan No. Ser. Faktur Pajak Yang Diganti/Ditukar
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
2	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
3	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
4	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
5	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
6	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
7	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
8	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
9	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
10	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
11	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
12	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
13	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
14	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
15	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
16	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
17	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
18	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
19	PT. PETRONAMA GRESIK	0000000000	000000-15-9078113	27-01-2015	113000000000	11300000000	0,00	
Jumlah					A2 >	155200000000	15520000000	0,00

Lampiran 13

Surat Setoran Pajak

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 3 <small>untuk disisipkan pada WPT 50%</small>
	KETERANGAN: Untuk pemenuhan kewajiban pajak, wajib pajak harus mengisi dan menyerahkan SSP ini kepada Kantor Pajak yang bersangkutan.		
NOMOR SSP: 012 0100 1234 5 012 345 678 9			
NAMA WP: SITO HERUTAMA			
ALAMAT WP: JENDELA BERSHAWAT 123456789012 BOGOR			
KCP: [] <small>Daftar Kantor Pajak yang terdaftar di Kantor Pajak</small>			
ALAMAT KCP: []			
Nomor Kuitansi Pajak: [] Kode Jenis Pajak: []		Nomor Penomoran: [] Kode Jenis Pajak: []	
Masa Pajak: [] <small>Untuk masa pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012</small>			
Jumlah Pajak: [] <small>Untuk masa pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012</small>			
Jumlah Pajak: [] <small>Untuk masa pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012</small>			
Ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak: [] Tanggal: 15 Mei 2012		Kepala Kantor Pajak: [] Tanggal: 15 Mei 2012	
Nama Jelas: []		Nama Jelas: []	
Untuk Kuitansi Pajak: [] Untuk Kuitansi Pajak: []			
Nomor: 0123456789012345 Kode: 012345 Tanggal dan Waktu: 15 Mei 2012 12.34.56			